

Implementasi Program Layanan Terapung Keagamaan (Lanterera) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga Kepulauan Riau

***Nurhadiyanti¹⁾, Agus Saputra³⁾ Rika Apriati Ningsih³⁾, Firman Abriansya⁴⁾**

^{1,2,4)} Prodi Ilmu Pemerintahan, STISIP Bunda Tanah Melayu, Indonesia

³⁾ Prodi Ilmu Administrasi Negara, STISIP Bunda Tanah Melayu, Indonesia

*E-mail Korespondensi: nurhadiyanti95@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang Implementasi Program LANTERA dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga. Program LANTERA merupakan sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses layanan administrasi, serta meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan keagamaan dan administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan program LANTERA. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program LANTERA di Kabupaten Lingga telah berjalan dengan baik dan membawa sejumlah peningkatan signifikan dalam pelayanan publik. Di antaranya adalah peningkatan kecepatan proses pelayanan, pengurangan hambatan birokrasi, serta peningkatan keterbukaan informasi layanan kepada publik. Program ini juga berhasil menciptakan mekanisme layanan yang lebih terintegrasi dan sistematis melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas interaksi antara petugas layanan dengan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, LANTERA.

Abstract

This paper discusses the Implementation of the LANTERA Program in Improving Public Services at the Ministry of Religious Affairs Office in Lingga Regency. The LANTERA program is a strategic initiative designed to improve service quality, accelerate administrative service processes, and increase public satisfaction in obtaining religious and administrative services. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies on the implementation of the LANTERA program. In general, the results of this study indicate that the implementation of the LANTERA program in Lingga Regency has been running well and has brought a number of significant improvements in public services. These include increasing the speed of the service process, reducing bureaucratic obstacles, and increasing the transparency of service information to the public. This program has also succeeded in creating a more integrated and systematic service mechanism through the use of information technology, thereby improving the quality of interactions between service officers and the public.

Keywords: Implementation, Public Services, LANTERA.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah hak dari setiap masyarakat yang pelaksanaannya didasarkan pada suatu prinsip kesederhanaan, keamanan,kepastian waktu, kejelasan, tanggung jawab, akurasi, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana, kesopanan dan keramahan, kenyamanan, serta kedisiplinan (Mursyidah, 2020; Prianto, 2018; Daming, 2024).

Pelayanan publik memiliki peran penting dalam aktivitas sehari-hari masyarakat karena mencakup berbagai aspek kebutuhan hidup. Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk menjalankan fungsinya secara optimal guna mewujudkan kepuasan masyarakat, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan. Dalam kajian Ilmu Pemerintahan, pihak yang berperan sebagai pelayan adalah pemerintah, sedangkan Masyarakat berperan sebagai pihak yang dilayani atau sebagai konsumen (Elkesaki et al., 2021).

Pemberian jaminan atas akses pelayanan tersebut merupakan bentuk implementasi peranan dan fungsi pemerintah sebagai penyedia layanan, sehingga keberadaannya sangat penting bagi masyarakat karena dapat menentukan dan mengukur kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, ini mencerminkan keinginan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik (Fauzia et al., 2024)

Lebih lanjut disampaikan dalam jurnal yang sama (Fauzia et al., 2024) nyatanya pelaksanaan pelayanan publik masih dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan repetitif, mulai dari adanya perubahan lingkungan, perkembangan teknologi informasi, dan sebagainya. Adanya tantangan tersebut diperlukan penyesuaian serta pembaharuan dalam sektor pelayanan publik agar kualitas pelayanan

semakin prima, sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan turut meningkat.

Peningkatan pelayanan publik harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan berkeadilan. Dalam hal ini, LANTERA bertujuan menghadirkan sistem layanan yang mampu memenuhi prinsip-prinsip tersebut melalui penyederhanaan proses layanan, penggunaan aplikasi digital, serta pembentukan unit layanan responsif di wilayah terpencil (Sinambela, 2017).

Program Lantera (Layanan Terapung Keagamaan) merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang digagas untuk mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi layanan di lingkungan Kementerian Agama. Perlu dilakukan kajian untuk mengetahui sejauh mana program ini telah diimplementasikan dan memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik, khususnya di Kabupaten Lingga (Budi, 2024).

Pelayanan publik harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan beradaptasi dengan kondisi lokal (Denhardt & Denhardt, 2016). Oleh karena itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga perlu mengadopsi pendekatan layanan yang inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi agar seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di pulau-pulau kecil, mendapatkan akses pelayanan yang setara. Khususnya di Kabupaten Lingga, yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan hambatan geografis, implementasi program LANTERA menjadi sangat strategis.

Implementasi program LANTERA tidak hanya menjadi langkah reformasi administrasi, tetapi juga bagian dari komitmen pelayanan publik yang berbasis nilai-nilai keadilan sosial. Penting untuk dikaji bagaimana pelaksanaan program ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lingga, termasuk sejauh mana efektivitasnya, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kepuasan masyarakat.

Layanan Terapung Keagamaan (LANTERA) adalah program inovatif yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Program ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau terpencil yang sulit mengakses layanan keagamaan resmi, seperti pencatatan pernikahan, pembinaan agama, dan administrasi keagamaan lainnya. LANTERA menggunakan perahu bermotor (pompong) yang dimodifikasi menjadi kantor layanan terapung untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.

Selain pencatatan pernikahan, LANTERA juga menyediakan layanan lain seperti konsultasi keagamaan, penyuluhan moderasi beragama, pembinaan administrasi nikah, dan sosialisasi hak-hak keluarga. Program ini bertujuan untuk mencegah praktik pernikahan siri yang sering terjadi akibat keterbatasan akses ke layanan resmi. Dengan pendekatan jemput bola melalui perahu terapung, LANTERA menjadi solusi efektif untuk memastikan layanan keagamaan yang inklusif dan merata, serta menjaga hak-hak masyarakat di daerah terpencil.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Secara ilmiah metode ini digunakan untuk menghimpun data berupa ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Adapun Teknik yang digunakan dalam menghimpun data terbagi atas observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi (Sugiyono, 2016).

Melihat langsung kondisi lapangan (observasi) membantu peneliti mendeskripsikan kondisi suatu wilayah atau tempat secara lebih faktual. Kondisi wilayah Kabupaten Lingga merupakan daerah pesisir yang akses antar pulau harus menggunakan pompong kayu untuk mendapati pulau satu dan pulau lainnya. Peneliti mewawancarai beberapa warga pesisir yang memperoleh langsung layanan keagamaan tersebut dan juga

beberapa pegawai kantor Kementerian Agama yang bertanggungjawab atas terlaksananya program LANTERA ini.

Untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan menyajikan data, maka peneliti menggunakan Teknik analisis data sederhana yang terdiri atas:

a. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan diatas yang meliputi observasi, wawancara, alat pengumpulan data dan studi pustaka.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah bagian dari analisis yang mempersingkat dan membuat fokus serta membuang hal yang tidak penting, mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

c. Penyajian Data

Penyajian informasi dalam bentuk kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Penyajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang dijadikan sebagai pertanyaan sehingga yang tersaji adalah deskripsi mengenai kondisi yang menceritakan dan menunjukkan permasalahan yang ada.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hal yang penting sebagai upaya untuk melakukan pertimbangan temuan peneliti. Pertimbangan dilakukan dengan cara menarik hubungan dari latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian untuk mencari jawaban hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis. Dengan demikian, kesimpulan merupakan penegasan dari temuan penelitian yang telah dianalisis.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum LANTERA

Layanan Terapung Keagamaan (LANTERA) adalah program inovatif yang dikembangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Program ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau terpencil yang sulit mengakses layanan keagamaan resmi, seperti pencatatan pernikahan, pembinaan agama, dan administrasi keagamaan lainnya. LANTERA menggunakan perahu bermotor (pompong) yang dimodifikasi menjadi kantor layanan terapung untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan. Sejak diluncurkan, LANTERA telah menjangkau 49 pulau di Kabupaten Lingga. Salah satu contoh penerapan program ini adalah pasangan Zukri Ernanda dan Yulia Citra dari Pulau Kentar, yang melangsungkan akad nikah di atas perahu motor milik Kemenag Lingga, lengkap dengan pelaminan sederhana dan iringan musik tradisional Melayu.

Layanan Terapung Keagamaan LANTERA adalah program inovatif yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Program ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat di pulau-pulau terpencil yang sulit mengakses layanan keagamaan resmi, seperti pencatatan pernikahan, pembinaan agama, dan administrasi keagamaan lainnya. LANTERA menggunakan perahu bermotor (pompong) yang dimodifikasi menjadi kantor layanan terapung untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan.

Selain pencatatan pernikahan, LANTERA juga menyediakan layanan lain seperti konsultasi keagamaan, penyuluhan moderasi beragama, pembinaan administrasi nikah, dan sosialisasi hak-hak keluarga. Program ini bertujuan untuk mencegah praktik pernikahan siri yang sering terjadi akibat keterbatasan akses ke layanan resmi. Dengan pendekatan jemput bola melalui perahu terapung, LANTERA menjadi

solusi efektif untuk memastikan layanan keagamaan yang inklusif dan merata, serta menjaga hak-hak masyarakat di daerah terpencil.

Program Lantera (Layanan Terpadu dan Responsif Agama) merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang digagas untuk mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi layanan di lingkungan Kementerian Agama. Perlu dilakukan kajian untuk mengetahui sejauh mana program ini telah diimplementasikan dan memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik, khususnya di Kabupaten Lingga.

Program LANTERA di Kementerian Agama Kabupaten Lingga merupakan upaya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kementerian Agama Kabupaten Lingga menyusun kebijakan internal terkait LANTERA dengan mengacu pada regulasi pelayanan publik dan arahan dari Kementerian Agama pusat. Penyusunan kebijakan didasari oleh identifikasi kebutuhan pelayanan masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

LANTERA merupakan bentuk inovasi berbasis lokal (*local-based innovation*) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik geografis Kabupaten Lingga. Melalui program ini, petugas Kementerian Agama seperti penyuluh, penghulu, dan ASN KUA memberikan layanan langsung berupa bimbingan pernikahan, pelatihan imam dan guru ngaji, pembinaan remaja masjid, serta dakwah yang menyentuh seluruh lapisan Masyarakat (Zaid, 2025).

Implementasi Program LANTERA

Implementasi program adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan dalam bentuk keputusan, seperti undang-undang, peraturan, atau kebijakan lainnya, ke dalam tindakan nyata yang dilakukan oleh aktor-aktor pelaksana. Ia menekankan bahwa

implementasi bukan sekadar menjalankan perintah, tetapi melibatkan serangkaian kegiatan administratif dan operasional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti isi kebijakan, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, serta sikap dan komitmen para pelaksana. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh seberapa baik kebijakan tersebut dipahami dan dijalankan oleh para pelaksana di lapangan sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang ada (Agustino, 2020; Ahamd, 2024; Sobron & Lubis, 2021)

Menurut Merille S. Grindle (Maulana et al., 2022; Sinaga et al., 2021) menyatakan bahwa implementasi program merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sementara (Tresiana & Noverman Duadji, 2017) memahami implementasi program sebagai kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan tujuan program atau kebijakan.

Rondinelli (Andivas et al., 2023; Lubis & Zubaidah, 2022; Wulandari et al., 2025; Zilda et al., 2022) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a. Kondisi lingkungan Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi program, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial kultural serta keterlibatan penerima program.
- b. Hubungan antar organisasi Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- c. Sumberdaya organisasi implementasi program untuk Implementasi program perlu didukung sumberdaya baik

sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non manusia (*non human resources*).

- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Berdasarkan faktor-faktor di atas yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Faktor-faktor tersebut akan menghasilkan kinerja dan dampak suatu program yaitu sejauh mana suatu program dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengetahui bagaimana perubahan kemampuan administratif pada organisasi lokal serta berbagai keluaran dan hasil yang lain (Dina et al., 2024).

Proses Implementasi program LANTERA dijalankan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu, di mana masyarakat dapat mengakses berbagai layanan keagamaan dan administrasi dalam satu lokasi. Petugas pelayanan berperan sebagai *front office* yang memberikan informasi, menerima berkas, serta mengarahkan masyarakat sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan.

Penyebarnya informasi Program LANTERA kepada masyarakat dilakukan melalui pendekatan berbasis jejaring sosial dan kelembagaan lokal. Keterlibatan aparat desa, tokoh masyarakat, dan penyuluh dalam menyampaikan informasi mencerminkan strategi komunikasi yang adaptif dan kontekstual, sehingga pesan program lebih mudah diterima oleh masyarakat sasaran. Pola sosialisasi sebelum pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan adanya perencanaan yang baik dalam memastikan partisipasi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan peran aktor lokal

berpotensi meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Program LANTERA, karena informasi disampaikan oleh pihak yang memiliki legitimasi sosial. Dengan demikian, mekanisme penyampaian informasi ini mendukung transparansi, meningkatkan keterjangkauan layanan, serta berkontribusi pada efektivitas pelaksanaan Program LANTERA di tingkat masyarakat.

Penyampaian informasi layanan Program LANTERA telah memanfaatkan beragam saluran komunikasi untuk memperluas jangkauan kepada masyarakat. Penggunaan pengumuman resmi dan koordinasi dengan pemerintah setempat mencerminkan pola komunikasi formal yang terstruktur, sementara pemanfaatan media sosial menunjukkan upaya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Kombinasi saluran komunikasi formal dan digital ini memungkinkan informasi layanan LANTERA menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan beragam. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah setempat memperkuat legitimasi informasi yang disampaikan serta mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, strategi komunikasi yang beragam ini mendukung prinsip transparansi, meningkatkan aksesibilitas informasi layanan, dan berkontribusi pada efektivitas pelaksanaan Program LANTERA di tingkat masyarakat.

Program LANTERA mendorong perubahan pola pelayanan dari yang sebelumnya bersifat parsial menjadi lebih terintegrasi. Hal ini berdampak pada peningkatan efisiensi waktu pelayanan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti keterbatasan jumlah petugas dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan informasi langsung dari Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Zamroni beliau menyebutkan bahwa secara umum, tujuan utama Program LANTERA dalam meningkatkan akses dan pelayanan ke pulau-pulau sasaran sudah mulai terlihat tercapai. Beberapa pulau yang

sebelumnya sulit dijangkau kini sudah rutin dikunjungi oleh tim program, sehingga layanan kepada masyarakat di sana menjadi lebih merata. Namun, masih ada beberapa sasaran yang belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan sarana dan personel. Jadi, meskipun progresnya baik, pencapaian tujuan masih bersifat bertahap.

Setelah diterapkannya Program LANTERA, masyarakat merasakan sejumlah perubahan positif, terutama dalam hal kemudahan dan kecepatan pelayanan di lingkungan Kementerian Agama. Proses administrasi menjadi lebih transparan dan terstruktur, sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi prosedur yang berbelit-belit. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antar unit layanan yang lebih baik membuat informasi dapat diperoleh dengan cepat, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keagamaan. Secara keseluruhan, LANTERA memberikan dampak nyata berupa efisiensi, kenyamanan, dan akuntabilitas dalam setiap layanan yang diterima masyarakat.

Untuk meningkatkan layanan yang lebih terpadu Kementerian Agama Kabupaten Lingga resmi menandatangani kontrak kapal untuk Program LANTERA di Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung Serumpun pada tanggal 30 maret 2026. Kapal ini akan di pergunakan untuk mempermudah akses layanan ke pulau-pulau mengingat kondisi geografis kabupaten lingga yang dikelilingi oleh perairan (Ghalib Adi Ramadahn, 2026).

Berdasarkan observasi lapangan terlihat bahwa masyarakat mulai lebih aktif ikut serta dalam kegiatan pembangunan dan program-program yang dijalankan. Mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga fasilitas dan mengikuti arahan tim program. Perubahan sikap ini juga terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pertemuan atau kegiatan sosial yang sebelumnya jarang dilakukan. Secara umum, masyarakat lebih termotivasi untuk berkolaborasi dan menjaga keberlanjutan program.

Sosialisasi atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lingga tidak lain untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan apa yang menjadi target dari program yang sedang di jalankan. Kementerian Agama Kabupaten Lingga juga menerapkan mekanisme evaluasi berbasis masukan masyarakat yang sistematis. Pencatatan dan analisis setiap masukan oleh tim pelaksana mencerminkan upaya pengelola program untuk menampung aspirasi masyarakat secara terstruktur dan menjadikannya dasar pengambilan keputusan. Relevansi masukan menjadi kriteria penting dalam menentukan perubahan atau perbaikan layanan, sehingga program tetap fokus pada kebutuhan nyata masyarakat. Praktik ini menunjukkan orientasi program pada peningkatan kualitas dan efektivitas layanan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan legitimasi sosial Program LANTERA di mata masyarakat.

Beberapa masukan yang menjadi catatan penting dalam proses implementasi adalah pemerataan di setiap daerah atau pulau-pulau. Hal ini juga menjadi hal mendasar untuk dianalisis karena berdasarkan penuturan dari Bapak Zamroni bahwa, pada prinsipnya layanan yang diberikan kepada pulau-pulau sasaran telah dirancang agar merata. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan tingkat layanan karena faktor geografis, akses transportasi, dan ketersediaan sumber daya. Beberapa pulau terpencil belum mendapatkan layanan secara optimal, meskipun tetap menjadi prioritas dalam perencanaan ke depan.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan bahwa pulau-pulau terpencil tetap menjadi prioritas dalam perencanaan ke depan menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk mengatasi ketimpangan/kekurangan layanan. Dengan demikian, pernyataan tersebut menggambarkan bahwa permasalahan pemerataan layanan bukan disebabkan oleh kurangnya perencanaan, melainkan oleh

tantangan operasional dan lingkungan yang memerlukan strategi khusus agar tujuan pemerataan dapat tercapai secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai Implementasi Program LANTERA dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Program LANTERA merupakan inovasi pelayanan publik yang efektif dalam menjangkau masyarakat kepulauan dan wilayah terpencil. Program ini mampu mengatasi keterbatasan akses geografis dengan menghadirkan layanan keagamaan dan administrasi secara langsung melalui pendekatan pelayanan bergerak (*mobile service*). Implementasi Program LANTERA telah menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dari aspek aksesibilitas, responsivitas, dan inklusivitas layanan. Masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengakses layanan Kementerian Agama kini dapat memperoleh pelayanan secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Hal ini mencerminkan adanya upaya nyata dari Kementerian Agama Kabupaten Lingga dalam memenuhi prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pelaksana Program LANTERA menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan publik. Sikap aparatur relatif ramah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut tercermin dari upaya memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, konsistensi dalam penerapan standar pelayanan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur menjadi hal yang penting untuk keberlanjutan program. Program LANTERA juga telah mengarah pada prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses pelayanan mulai terbuka dan

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Namun, akses masyarakat terhadap informasi pelayanan masih belum maksimal. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan juga masih terbatas. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan keterlibatan publik perlu terus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Implementasi Big Data pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2).
- Ahamd, F. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3).
- Andivas, M., Pamungkas, I. B., Apolos, J., Sianipar, E. M. F. G., Irwan, A. A. M., & Awalia, N. A. (2023). Efektivitas Implementasi Program 5S Pada Kantor Pemerintah Desa. *Surya Abdimas*, 7(2).
<https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i2.2977>
- Budi, S. B. (2024). PENINGKATAN LAYANAN KEAGAMAAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN LINGGA MELALUI PROGRAM LAYANAN TERAPUNG KEAGAMAAN. *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA*, 2(3).
<https://doi.org/10.61860/jigp.v2i3.87>
- Daming, M. (2024). Pentingnya Perilaku dalam Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Pelayanan Prima. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 4(1).
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2016). The new public service: Serving, not steering. In *The New Public Service: Serving, Not Steering*.
<https://doi.org/10.4324/9781315289496>
- Dina, D., Zakaria, M., Iskandar, E., & Hermana Suherlan, R. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM KANG PISMAN (KURANGI, PISAHKAN DAN MANFATKAN) SAMPAH DI KELURAHAN RANCANUMPANG KOTA BANDUNG. *NEO POLITEA*, 5(1).
<https://doi.org/10.53675/neopolitea.v5i1.1346>
- Elkesaki, R. 'Arsy, Oktaviani, R. D., & Setyahrambang, M. P. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA BANDUNG. *Jurnal Caraka Prabu*, 5(1).
<https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.456>
- Fauzia, D. E., Rochaeni, A., & Munawaroh, S. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1).
- Ghalib Adi Ramadahn. (2026). *Kemenag Lingga Teken Kontrak Kapal LANTERA, Siap Layani Masyarakat*. RRI.CO.ID.
<https://rri.co.id/tanjungpinang/regional/2295659/faq.html>
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2022). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(2).
<https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.14298>

- Maulana, D., Nurasa, H., & Karlina, N. (2022). Implementasi Program Penataan dan Penguatan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. *Responsive*, 5(2). <https://doi.org/10.24198/responsive.v5i2.41154>
- Mursyidah, L. (2020). Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik. In *Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik*. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-97-1>
- Prianto, A. (2018). MENAKAR KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. *LECTURER ARTICLES*.
- Sinaga, K., Nasution, M. A., & Dewi, A. T. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1). <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.163>
- Sinambela, L. P. (2017). Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. In *Bumi Aksara*.
- Sobron, M., & Lubis. (2021). Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu. *Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU*, 4(1).
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Tresiana, N., & Noverman Duadji, D. (2017). KOLABORATIF PENGELOLAAN PARIWISATA TELUK KILUAN (Collaborative Management Of The Teluk Kiluan Tourism). *Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan*.
- Wulandari, L., Kasiami, S., Subandi, E., & Tjatur, K. (2025). Implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 9(1). <https://doi.org/10.56071/jian.v9i1.1148>
- Zaid. (2025). *LANTERA: Inovasi Layanan Publik Keagamaan di Wilayah Terluar Kabupaten Lingga*. Kementerian Agama Kabupaten Lingga. <https://lingga.kemenag.go.id/berita/detail/lantera-inovasi-layanan-publik-keagamaan-di-wilayah-terluar-kabupaten-lingga>
- Zilda, M. F., Miradhia, D., & Pancasilawan, R. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM E-SAMSAT DI JAWA BARAT. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2). <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.28691>